



Urgensi Kurikulum Gender dalam Pendidikan

Khusnul Khotimah *)

*) Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.) alumnus Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia menjadi dosen tetap pada Jurusan Dakwah (Komunikasi) STAIN Purwokerto.

Abstract: One of education goal is how to realize fair society, by not discriminate one sex. But the reality exist discrimination at education that necessitate several effort to solve it, on of it is by formulating curriculum that have gender perspective. Curriculum is a development of vision and mission of educational institution that want to realize education goal. Gender curriculum is based on an assumption that woman and man are equal in education, and have equal opportunity to get education. In its application, gender curriculum can be formulated *implicitly* (*hidden curriculum*), or explicitly (*overt curriculum*). However, to explain gender problems we recommend explicit way. **Keywords:** *Gender curriculum, education.*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan aktivitas yang khas bagi manusia dalam suatu komunitas masyarakat dengan tujuan untuk memanusiakan manusia,¹ dan merupakan instrumen yang penting bagi pemberdayaan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang termarjinalkan.² Pendidikan juga merupakan kunci terwujudnya keadilan gender dalam masyarakat, karena di samping merupakan alat untuk mentransfer norma-norma masyarakat, pengetahuan dan kemampuan manusia, juga sebagai alat untuk mengkaji dan menyampaikan ide-ide dan nilai baru. Dengan demikian, lembaga pendidikan merupakan sarana formal untuk sosialisasi sekaligus transfer nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk nilai dan norma gender. Nilai dan norma tersebut ditransfer secara lugas maupun secara tersembunyi, baik melalui buku-buku teks yang digunakan maupun pada suasana dan proses pembelajaran.

Oleh karena itu, dalam lembaga pendidikan, sebagai tempat mentransfer pengetahuan kepada masyarakat, mewujudkan keadilan gender merupakan hal yang niscaya. Untuk mengarah pada terwujudnya keadilan gender yang dimaksud maka perlu; (1) memberlakukan keadilan gender dalam pendidikan dan menghilangkan perbedaan pada peserta didik, (2) mengupayakan keadilan gender di kalangan staf dan pimpinan, dan (3) meredam sebab-sebab terjadinya kekerasan dan diskriminasi melalui materi pengetahuan yang diajarkan, proses pembelajaran yang dilakukan, dan menentang segala ide dan pemikiran yang mengandung stereotype negatif. Dari tiga hal di atas, maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan adalah bagaimana menyusun kurikulum yang dapat menciptakan relasi gender yang dinamis. Tulisan ini bermaksud untuk memaparkan tentang urgensi kurikulum yang berperspektif gender dalam pendidikan sebagai upaya sosialisasi dan implementasi pengarusutamaan gender di bidang pendidikan.



Kurikulum

Kurikulum merupakan program untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan. Menurut Elliot sebagaimana dikutip oleh Susilaningih menyatakan bahwa kurikulum sesungguhnya menggambarkan dan mencerminkan sikap dan pandangan yang ada di kelas, lembaga pendidikan, masyarakat, dan negara mengenai isu-isu tertentu.³ Oleh karena itu, kurikulum seyogyanya menggambarkan tujuan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan kehendak manusia yang membuat kurikulum. Kehendak manusia siapapun dan dimanapun pada dasarnya menghendaki terwujudnya masyarakat yang adil, tanpa diskriminasi dan subordinasi terhadap salah satu jenis kelamin.

Pengembangan visi dan misi yang dimiliki oleh lembaga pendidikan diaktualisasikan dalam kurikulum. Dengan kata lain, kurikulum menggambarkan dan menerjemahkan visi dan misi yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tersebut. Pendidikan merupakan salah satu implementasi dari tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Corak penerima tugas itu berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Dalam hal inilah maka dalam pendidikan sistem dan tujuan pendidikan masing-masing masyarakat berbeda, bukan hasil ekspor atau import, tetapi ia harus timbul dari dalam masyarakat pendidikan itu sendiri.⁴

Kemudian, kurikulum akan dijabarkan dalam komponen-komponennya yang terdiri dari tujuan pembelajaran, materi, dan topik perkuliahan bahan bacaan atau referensi yang dipakai, strategi pembelajaran, media atau sarana dan prasarana yang digunakan dan evaluasi. Lembaga pendidikan yang memperhatikan kesetaraan gender akan mencantumkan upaya kesetaraan gender ini sebagai bagian dari visi dan misinya, yang kemudian akan terimplementasikan melalui kurikulum beserta komponen-komponennya

Pada umumnya isi kurikulum adalah nama-nama mata pelajaran beserta silabinya atau pokok bahasan, tetapi kurikulum sebenarnya tidak harus berupa nama mata pelajaran, ia dapat saja berupa nama kegiatan. Inilah pengertian kurikulum yang paling luas dan yang sering dipakai dalam pendidikan.⁵

Faktor-faktor Penyebab Kurikulum Gender

Meskipun pembangunan pemberdayaan perempuan telah mulai dilaksanakan secara terencana sejak tahun 1978, namun data yang ada menunjukkan masih tertinggalnya perempuan dibandingkan dengan laki-laki, tidak terkecuali dalam pendidikan. Dalam hal ini, indikator-indikator yang digunakan adalah angka partisipasi sekolah, angka *melek* huruf, akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan, dan muatan buku bahan-bahan ajar. Dalam kenyataan tersebut perumusan kurikulum yang responsif gender menjadi tuntutan. Hal ini disebabkan oleh:

1. Adanya diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat sehingga menimbulkan dominasi terhadap jenis kelamin tertentu dalam bentuk stereotipe, beban ganda, dan kekerasan. Hal ini disebabkan, salah satunya, oleh bangunan kurikulum yang bias gender.⁶



2. Masih terjadinya kesenjangan gender dalam tingkat pendidikan pada laki-laki. Data statistik dan berbagai hasil studi menunjukkan adanya kesenjangan gender di bidang pendidikan. Semakin tinggi jenjang, representasi perempuan semakin kecil dibanding dengan laki-laki. Senas 2000 menunjukkan bahwa penduduk perempuan yang berhasil menamatkan pendidikan SLTP baru mencapai 36,9%, sedangkan penduduk laki-laki 46 %. Pada jenjang perguruan tinggi, jumlah perempuan hanya sekitar 3,06%, di bawah jumlah laki-laki yang mencapai 4,1%.⁷
3. Persentase penduduk perempuan yang buta huruf lebih tinggi dari persentase buta huruf penduduk laki-laki. Berdasarkan data BPS tahun 2000, penduduk perempuan yang buta huruf adalah 23,1%, sedangkan penduduk laki-laki adalah 10,7%.⁸
4. Muatan referensi atau sumber rujukan masih bias gender. Di dalam bahan ajar atau buku-buku yang dipergunakan banyak yang tidak mencerminkan kesetaraan gender. Sebagai contoh dalam materi keagamaan selalu mencantumkan maskulinitas atau laki laki sebagai sosok yang lebih sempurna dan kuat dibanding perempuan sehingga tugas yang strategis lebih diidentikkan hanya cocok bagi laki-laki, seperti seorang pemimpin harus laki-laki.

Untuk mengatasi ketertinggalan perempuan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang pendidikan, pemerintah mencanangkan program pengarusutamaan gender yang tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa setiap institusi pemerintah wajib memasukkan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program/kebijakan, dan kegiatannya. Hal ini secara tegas juga dituangkan dalam GBHN 1999-2004, UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas dan Kesepakatan Forum Pendidikan Dunia di Dakkar pada bulan April 2000 tentang pendidikan untuk semua, yang salah satu komponennya adalah kesetaraan gender, termasuk di dalamnya bagaimana merumuskan kurikulum yang berbasis pada kesetaraan gender.

Kurikulum yang Berkeadilan Gender

Dalam al-Qur'an maupun Hadis telah ditunjukkan tentang kedudukan laki-laki dan perempuan, di mana perempuan dan laki-laki adalah setara. Sebagai contoh dalam surat al-Baqarah (2: 187), "*Istri-istrimu adalah pakaianmu, dan engkau adalah pakaian mereka*". Pakaian dapat berfungsi sebagai pengganti untuk seseorang, dengan pakaian baru seorang mendapatkan kepribadian baru. Lebih jauh, pakaian menyembunyikan tubuh, menutupi pandangan terhadap bagian-bagian yang bersifat pribadi dan melindungi pemakainya. Dalam interpretasi ini suami-istri berbicara satu sama lain kepada *alter-ego* mereka, dan setiap diri melindungi pasangannya. Hal ini memperlihatkan hubungan kesetaraan dalam kebersamaan dan betapa baiknya prinsip *yinyang* yang berlaku dalam perkawinan.⁹

Dalam hal kecerdasan, tidak ada satu penelitian pun yang mengatakan bahwa laki-laki secara biologis lebih cerdas dari perempuan, tetapi kecerdasan itu lebih dikarenakan faktor pendidikan. Jika dalam realitasnya laki-laki mengungguli perempuan dalam berbagai kehidupan termasuk masalah



kecerdasan, hal itu juga disebabkan oleh sistem pendidikan yang memihak laki-laki. Laki-laki mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan sementara perempuan tidak.¹⁰

Perempuan dalam al-Quran dan al-Hadis memiliki kesempatan yang sama dalam mencari ilmu dan berpendidikan.¹¹ Ini merupakan sebuah konsekuensi untuk mewujudkan nilai kemanusiaan dengan adanya pemerataan yang tidak bias gender. Anak perempuan sebagaimana anak laki-laki harus mempunyai kesempatan untuk bersekolah lebih tinggi. Bukan menjadi alternatif kedua jika kekurangan biaya untuk sekolah. Pernyataan tentang persamaan pendidikan juga dikemukakan oleh Athiyah yang dikutip oleh Roqib bahwa Islam menyerukan adanya kemerdekaan, persamaan, dan kesempatan yang sama antara yang kaya dan miskin dalam bidang pendidikan di samping penghapusan sistem-sistem kelas dan mewajibkan setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu, serta memberikan kepada setiap muslim itu segala jalan untuk belajar, bila mereka memperhatikan adanya minat dan bakat.¹²

Menurut Abbas Karafat sebagaimana dikutip oleh Nashruddin Baidan juga dikatakan bahwa Nabi memerintahkan supaya memperhatikan pendidikan perempuan sehingga dengan mendidiknya itu orangtuanya dapat terhindar dari api neraka, *“Ibu bagaikan sekolah, bila anda mempersiapkannya secara baik, berarti anda telah mempersiapkan generasi bangsa dengan integritas kepribadian yang baik”*. Dengan demikian, Islam menginginkan kedua jenis kelamin yang berbeda itu memperoleh pendidikan yang layak agar mereka memiliki pengetahuan yang seimbang sehingga mereka dapat berjalan seiring dalam berbagai aspek kehidupan dan beribadah untuk mencapai kehidupan di dunia dan akhirat.¹³ Membiarkan perempuan dalam kebodohan merupakan kezaliman karena membiarkan mereka tidak mengembangkan potensi negara. Perlakuan tersebut di samping akan merugikan potensi negara juga bertentangan dengan al-Qur’an dan sunnah.

Pendidikan bagi perempuan semakin penting artinya bila dilihat dari tugas dan fungsinya, baik dalam masyarakat maupun dalam rumah tangga. Tugas-tugas tersebut mustahil dapat terlaksana dengan baik tanpa pendidikan yang baik. Tugas-tugas perempuan kian kompleks seiring dengan perkembangan dunia, maka pendidikan bagi perempuan mutlak adanya. Perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan membuat mereka tidak mampu menjalankan perannya, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Apabila perempuan terdidik dengan baik, niscaya pemerataan pendidikan telah mencapai sasaran. Oleh karena itu, ibu adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Ibu adalah sekolah bagi rakyat tanpa mengenal lelah, ekonomi, waktu, dan dilakukan dengan penuh kasih sayang. Bandingkan, jika mendidik seorang laki-laki, maka pendidikan itu hanya untuk satu orang, yaitu laki-laki itu sendiri. Akan tetapi, jika mendidik perempuan, maka sama saja dengan mendidik satu orang keluarga karena peran ibu.¹⁴ Kenyataan ini dapat dilihat di masyarakat bahwa kebanyakan anggota keluarga sukses dalam pendidikan lebih disebabkan oleh ketekunan ibu dalam mendidik anaknya. Oleh karenanya ibu sebagai seorang pendidik harus mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan dan keterampilan.



Krisis hubungan suami-istri yang terjadi dalam keluarga, bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat yang kurang berakhlak, tetapi masyarakat bermoral pun dapat mengalami krisis yang sama, apabila tingkat pendidikan dan pengalaman antara keduanya berbeda jauh.

Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa semakin baik pendidikan perempuan akan semakin baik harkat dan martabatnya. Semakin baik moralitas bangsa maka dapat membantu mencerdaskan masyarakat bangsa sehingga dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan, di samping lebih memanusiakan manusia dan menghargai kepada hak-hak orang lain.

Kerangka Kerja Kurikulum Gender

Strategi dan kerangka kerja yang diusulkan oleh Banks, untuk memasukkan materi-materi gender dalam sebuah kurikulum, terbagi dalam empat level yang saling berhubungan antara lain sebagai berikut.

1. Contributions approach

Pendekatan ini dilakukan oleh sistem dan kebijakan yang ada pada lembaga pendidikan melalui kurikulum. Masalah-masalah gender telah dimasukkan secara eksplisit dalam kurikulum yang ada. Pendekatan model ini sudah diberlakukan antara lain di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,¹⁵ UIN Syarif Hidayatullah, dan Universitas Indonesia. Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Sarif Hidayatullah perumusan kurikulum berperspektif gender tercermin dalam berbagai mata kuliah yang memunculkan materi gender secara eksplisit. Hasil dari rumusan kurikulum berperspektif gender tersebut merupakan sebuah capaian yang baik dari kebijakan pimpinan dalam rangka membangun kesetaraan gender. Sementara di Universitas Indonesia untuk program Pascasarjana, perumusan kurikulum tersebut lebih diperkuat lagi, karena ditunjukkan dalam program studi Kajian Wanita. Dalam program tersebut terdapat mata kuliah yang jumlahnya 40-46 sks, semua mata kuliah tersebut menggunakan perspektif gender.¹⁶

2. Additive approach

Dalam pendekatan ini variasi dan perspektif lain ditambahkan pada kurikulum tanpa merubah struktur kurikulum yang ada secara umum. Pemikiran dan ide-ide baru mengenai gender dapat dimasukkan dan dikaitkan dengan kurikulum yang ada. Pemakaian jenis kurikulum ini secara umum yang masih dipergunakan di lembaga pendidikan yang belum memberlakukan kebijakan kurikulum berperspektif gender secara eksplisit. Hal ini tergantung pada kepekaan para pendidik tentang gender. Bagi pendidik yang sudah mengetahui tentang gender, baik secara kognisi, afeksi, dan psikomotor serta sering mengikuti kegiatan pelatihan gender akan memasukkan kurikulum gender tersebut dalam materi ajarnya, dengan tidak mengubah kurikulum secara umum.

3. Transformational approach

Pada pendekatan ini tujuan, struktur, dan perspektif yang ada dalam kurikulum semuanya dirombak dan diganti dengan tujuan dan perspektif yang sensitif gender. Pengajaran dalam kurikulum ini dengan



melihat mata kuliah yang ada kemudian silabinya diubah, baik dalam struktur, tujuan, dan perspektifnya yang berkaitan dengan isu-isu gender. Sebagai contoh pada mata kuliah akhlak tasawuf yang termasuk dalam mata kuliah pendukung, yang harus dipelajari oleh seluruh mahasiswa. Sebagai mata kuliah yang termasuk dalam KBK, mata kuliah akhlak tasawuf tidak hanya berisi tentang ajaran normatif, tetapi diharapkan benar-benar dapat teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja karena akhlak tasawuf lebih berkaitan dengan dimensi esoteris Islam, tentu tidak memasukkan isu-isu gender di dalamnya, tetapi bagaimana memasukkan pandangan-pandangan sufistik tentang perempuan dengan penekanan yang jelas, serta meluruskan pendapat-pendapat yang bias gender.¹⁷

4. *Social Action Approach.*

Pada pendekatan ini siswa diarahkan untuk membuat keputusan dan tindakan yang sensitif gender dalam aktivitas kehidupan mereka. Hal ini dilakukan dengan cara mendiskusikan dalam kelas mengenai konsep, peran dan relasi gender dalam masyarakat, seperti mengapa terjadi diskriminasi terhadap perempuan, apa yang menyebabkan adanya diskriminasi itu dan bagaimana keadaan dalam kelas apakah ada diskriminasi, dan bagaimana diskriminasi itu harus disikapi. Dengan pendekatan ini dimaksudkan supaya siswa dapat melakukan kritik sosial bahkan dapat melakukan perubahan sosial.¹⁸

Kurikulum yang digunakan oleh pendidik terbagi menjadi dua. *Pertama*, bersifat *overt curriculum*, di mana dalam kurikulum ini semua unsur yang ada bersifat terbuka, dapat tergambar mulai dari tujuan pembelajaran, materi, dan topik-topik perkuliahan, bahan bacaan strategi pembelajaran dan evaluasi. *Kedua*, bersifat *hidden curriculum*, di mana kurikulum yang disampaikan oleh pengajar di kelas dengan menggunakan strategi pembelajaran dan media yang dipakai termasuk bahasa komunikasi yang digunakan. Kurikulum sesungguhnya tidak hanya menggambarkan dan mencerminkan sikap dan pandangan yang ada di kelas dan lembaga pendidikan, tetapi juga menggambarkan masyarakat dan bahkan negara mengenai isu-isu tertentu, termasuk isu gender.

Menurut Nur Hamim, adanya bangunan kurikulum yang tidak berbasis gender disebabkan oleh disparitas fungsi antara *hidden curriculum* dengan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku pendidikan. Hal ini terjadi karena banyak pelaku pendidikan, termasuk guru dan dosen tidak memahami muatan tersembunyi dari kurikulum yang mereka pergunakan sehingga hal tersebut mempengaruhi pada aspek perilaku yang mereka lakukan sehari-hari.¹⁹ Oleh karena itu, kurikulum yang sensitif gender seharusnya bersifat eksplisit (*overt curriculum*) sehingga permasalahan-permasalahan gender dapat diungkap secara jelas.

Prinsip Pembelajaran dalam Kurikulum Gender

Penerapan pembelajaran dalam lembaga pendidikan seharusnya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, berakhlak baik, dan memanusiakan manusia tanpa melihat kepada jenis kelamin tertentu. Untuk mencapai maksud tersebut, maka uraian tentang prinsip-prinsip pembelajaran dengan kurikulum gender dapat dilihat sebagai berikut.



1. Kesiapan pendidik dalam kemampuan berwacana gender

Memiliki kesiapan untuk melaksanakan pembelajaran yang berperspektif gender bagi mata kuliah yang diampunya merupakan modal yang utama. Oleh karena itu, para pendidik seyogyanya sudah mengikuti Pelatihan Sensitivitas Gender yang dilaksanakan oleh PSG/PSW di perguruan tinggi. Salah satu tujuan Pelatihan Sensitivitas Gender adalah agar para peserta mampu mengidentifikasi permasalahan ketidakadilan gender pada materi kuliah. Di samping itu, wawasan gender yang dimiliki para pendidik merupakan kerangka dasar dalam membuat silabi mata kuliah dan proses pembelajaran di kelas yang berperspektif gender. Selain itu, bagi para pendidik, untuk meningkatkan pembelajaran yang berwawasan gender sebaiknya diberi pelatihan tentang kurikulum dan desain pembelajaran yang berperspektif gender.

2. Sikap pendidik adalah harus adil dan setara dalam memberlakukan peserta didik, laki-laki maupun perempuan perlu mendapat tugas dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Tindakan *affirmative* penting dilakukan jika ada salah satu pihak yang belum optimal dalam menggunakan kesempatan belajar. Misalkan bagi siswa perempuan diberi kesempatan untuk aktif dalam pembelajaran dengan cara memberikan kesempatan pertama bagi siswa perempuan untuk merespon dan mengeluarkan pendapatnya dalam pembelajaran sebelum laki-laki. Perlakuan pendidik di kelas juga merupakan cerminan dalam mempraktikkan kesetaraan gender. Para pendidik hendaknya tidak melakukan pelecehan secara gender terhadap siswa laki-laki maupun perempuan, baik secara tersirat maupun nyata. Secara tersirat bisa dalam bentuk kata-kata yang tidak etis, yang secara tidak langsung dapat merendahkan martabat jenis kelamin tertentu.

3. Tidak mengajari atau menggurui

Dalam proses pembelajaran seorang pendidik seharusnya tidak menggurui kepada peserta didik, apalagi untuk hal-hal yang sudah umum diketahui dan dialami oleh peserta didik. Yang harus dilakukan adalah mendialogkan apa yang diketahui dan dialami oleh peserta didik dengan pendidik. Proses belajar mengajar akan lebih efektif apabila peserta didik secara aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik akan mengalami, menghayati, dan menarik pelajaran dari pengalaman itu, dan pada gilirannya hasil belajar merupakan bagian dari diri, perasaan, dan tentu saja dalam proses seperti itu peserta didik didorong dan dikondisikan untuk lebih kreatif.²⁰

4. Terbuka

Pendidik hendaknya terbuka secara akademik, tidak menyembunyikan sumber belajar yang berperspektif gender. Jika terdapat sumber rujukan yang tidak berperspektif gender, hendaknya diganti dengan buku-buku rujukan yang berperspektif gender. Jika dalam materi tertentu tidak ada buku rujukan yang berperspektif gender, maka pendidik harus memberi muatan gender tersendiri dalam menganalisis buku tersebut.

5. Penggunaan pendekatan holistik



Pada mata kuliah atau materi ajar yang bernuansa keagamaan atau mengandung pesan-pesan moral tertentu, sangat dianjurkan kepada pendidik untuk menggunakan pendekatan yang holistik ketika membangun pemahaman atas materi tersebut. Dengan demikian, peserta didik akan menjadi orang yang terbuka dan tidak berwawasan picik.²¹ Peserta didik merupakan subjek yang unik, perlu di beri stimulus untuk mengembangkan seluruh kemampuannya, pengenalan, kreatifitas nalar, perasaan, penghayatan, kemauan, dan kecakapannya perlu mendapat kesempatan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran. Dalam hal inilah pendidik perlu mengembangkan teknik-teknik bervariasi dalam pembelajaran.

6. Dialog

Karena mendasarkan pembelajaran pada azas kesetaraan, maka proses yang berlangsung bukan pengajaran yang bersifat satu arah, melainkan proses komunikasi dalam berbagai bentuk kegiatan belajar seperti berbagi pengalaman, diskusi, menelaah wacana, memberi komentar kasus, menerapkan hukum dan sebagainya. Untuk membantu visualisasi beragam persoalan yang didiskusikan dibutuhkan berbagai media, seperti wacana, *hand out*, gambar, film, kertas dan alat tulis lainnya. Adanya media ini memungkinkan terjadinya dialog kritis antara semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran.

Penutup

Lembaga pendidikan sebagai sebuah institusi yang akan mencetak generasi bangsa memiliki nilai-nilai moralitas yang luhur, memanusiaikan manusia yang berprinsip pada keadilan dan kesetaraan, menerapkan kurikulum yang berperspektif gender menjadi sebuah keniscayaan. Untuk melaksanakan usaha pengembangan kurikulum gender dapat diaplikasikan secara *hidden curriculum* dan *overt curriculum*. Namun demikian, supaya permasalahan-permasalahan gender dapat diungkap secara jelas, maka kurikulum gender sebaiknya diterapkan secara eksplisit (*overt curriculum*). Dalam strategi dan kinerja kurikulum gender tersebut, seorang pendidik harus memiliki prinsip pendidikan yang mengarah pada pemberdayaan dan kesetaraan, di mana peserta didik diposisikan sebagai orang yang memiliki kemandirian dalam mengikuti proses pendidikan, dan pendidik harus memosisikan antara perempuan dan laki-laki dengan setara.

Endnote

¹ Ahmad Tafsir, *Fisafat Pendidikan Islam* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 33.

² Rr. Suhartini, "Dimensi Gender dalam Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Rawan Longsor", dalam *Model-model Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hal. 137.

³ Susilaningih, dkk. *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga dengan McGill IISEP, 2004), hal. 31.

⁴ M. Quraish Shihab, "Konsep Pendidikan dalam al-Qur'an", dalam *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2002), hal. 173.



⁵ Pemakaian kata kurikulum sehari-hari dapat diilustrasikan dalam tiga pengertian. *Pertama*, kurikulum dalam arti mata pelajaran pada suatu jenjang pendidikan. Orang tua murid mengatakan, "Saya menyekolahkan anak saya ke sekolah *anu*, karena kurikulumnya baik, ada pelajaran bahasa Inggris, ada pelajaran pengoperasian komputer". *Kedua*, kurikulum dalam arti silabus. Kata kurikulum dalam pengertian ini digunakan tatkala seorang guru yang baru diangkat, kemudian ia berkata "saya disertai mengajar mata pelajaran *anu*, tolong saya ingin mengopi kurikulumnya". *Ketiga*, kurikulum dalam arti program sekolah. Ini pengertian kurikulum yang paling luas. Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan*, hal. 102-3.

⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.13-17.

⁷ Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, "Pengaruhutamakan Gender Bidang Pendidikan", dalam *News Letter*, No. 7, Th. 2, Juli-September 2003.

⁸ *Ibid.*

⁹ Ratna Megawangi, "Sekapur Sirih", dalam *The Tao of Islam, Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, Terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1999), hal. 16.

¹⁰ Bustamin, "Menggali Isu Gender dalam Kurikulum Hadis dan Ulumul Hadis", dalam *Membangun Kultur Akademik Berperspektif Gender* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, Departemen Agama, UIN Syarif Hidayatullah, CIDA dan McGill, 2005), hal. 80.

¹¹ Dalam Surat al-Mujadalah (58:11) "...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

¹² Roqib, *Pendidikan Perempuan* (Yogyakarta: Gama Media dengan STAIN Purwokerto, 2003), hal. 48-9.

¹³ Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi, Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 33.

¹⁴ Roqib, *Pendidikan Perempuan*, hal. 50.

¹⁵ Susilaningih, dkk, *Kesetaraan Gender*, hal. 182.

¹⁶ Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2 Agustus 2008, (<http://www.pps.ui.ac.id/ui/kw--kurikulum.htm>)

¹⁷ Syahrul A'dam, "Isu-isu Gender dalam Mata Kuliah Tasawuf", dalam *Membangun Kultur Akademik Berperspektif Gender*, hal. 94.

¹⁸ Susilaningih, dkk, *Kesetaraan Gender*, hal.33.

¹⁹ Membangun Kurikulum Berbasis Gender: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 02/08/2008, (<http://www.sunan-ampel.ac.id/berita/detail.php?id=98>).

²⁰ Hisyam Zaini, dkk, *Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Center for Teaching Staff Development (CTSD) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2002), hal. 98.

²¹ Djunaidatul Munawaroh, "Pendidikan dengan Pendekatan Pemberdayaan", dalam *Membangun Kultur Akademik Berperspektif Gender*, hal. 50.

Daftar Pustaka

A'dam, Syahrul. 2005. "Isu-isu Gender dalam Mata Kuliah Tasawuf". dalam *Membangun Kultur Akademik Berperspektif Gender*. Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, Departemen Agama, UIN Syarif Hidayatullah, CIDA dan McGill.

Al-Qur'an.

Baidan, Nashruddin. 1999. *Tafsir bi al-Ra'yi, Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bustamin. 2005. "Menggali Isu Gender dalam Kurikulum Hadis dan Ulumul Hadis", dalam *Membangun Kultur Akademik Berperspektif Gender*. Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, Departemen Agama, UIN Syarif Hidayatullah, CIDA dan McGill.



- Fakih, Mansour. 2004. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Megawangi, Ratna. 1999. "Sekapur Sirih" dalam. *The Tao of Islam, Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*. terj. Rahmani Astuti Bandung: Mizan.
- Membangun Kurikulum Berbasis Gender: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. 02/08/2008. <http://www.sunan-ampel.ac.id/berita/detail.php?id=98>.
- Munawaroh, Djunaidatul. 2005. "Pendidikan dengan Pendekatan Pemberdayaan". dalam *Membangun Kultur Akademik Berperspek*. Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah. Departemen Agama. UIN Syarif Hidayatullah. CIDA dan McGill.
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti. "Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan" dalam *News Letter*, No. 7, Th.2, Juli – September 2003
- Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 2 Agustus 2008. <http://www.pps.ui.ac.id/ui/kw-kurikulum.htm>
- Roqib. 2003. *Pendidikan Perempuan*. Yogyakarta: Gama Media dengan STAIN Purwokerto.
- Shihab, M. Quraish. 2002. "Konsep Pendidikan dalam al-Qur'an dalam *Membumikan Al-Qur'an*". Bandung: Mizan.
- Suhartini, Rr. 2005. "Dimensi Gender dalam Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Rawan Longsor" dalam *Model-model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: LKiS.
- Susilaningsih, dkk. 2004. *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga dengan McGill IISEP.
- Tafsir, Ahmad. 2006. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Zaini, Hisyam. Dkk. 2002. *Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Center for Teaching Staff Development (CTSD) IAIN Sunan Kalijaga.